



**WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 263 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 323 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Wali Kota Nomor 323 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 323 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 02);
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 28);
11. Keputusan Wali Kota Nomor 262 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 312 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 323 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi perubahan pada Lampiran Keputusan Nomor 323 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 masing-masing unit kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 Oktober 2024,

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 263 TAHUN 2024

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 323 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024

Tanggal : 10 Oktober 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1.	BAGIAN UMUM	KEPALA BAGIAN UMUM	PROGRAM PENUNJANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 52,121,311,064 Rp 41,769,000 Rp 45,711,000 Rp 42,146,500 Rp 34,148,500 Rp 34,980,000 Rp 155,193,000

			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp 629,630,453
			Administrasi Kepegawaiian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Rp 308,900,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Rp 355,535,500
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 511,800,000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 1,031,894,194
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 598,365,000
				Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Rp 165,000,000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 3,380,216,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp 12,415,346,000
				Pengadaan Mebel	Rp 1,323,507,000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1,307,583,492
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 100,000,000
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 6,357,600,000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 342,750,000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 3,039,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Rp 3,357,464,600
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 106,700,000
				Pemeliharaan Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1,144,286,000

				Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 1,212,948,000
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 98,741,668
				Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 116,500,000
				Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 15,000,000
				Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 399,999,996
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp 1,090,410,000
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp 992,484,000
2.	BAGIAN ORGANISASI	KEPALA BAGIAN ORGANISASI			Rp 836,655,000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analis Jabatan Rp 398,066,000 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Rp 172,526,000 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Rp 99,415,000 Monitoring, Evaluasi dan Pengendakiaan Kialitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Rp 76,370,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Rp 90,278,000
3.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			Rp 1,391,931,500
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Potokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan Rp 1,271,826,000 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Rp 53,200,000 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Rp 66,905,500
4.	BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN			Rp 1,124,454,000

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp 369,395,500
					Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp 130,850,000
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp 615,475,000
				Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp 8,733,500
5.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Rp 1,622,096,520
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kinerja Sosial	Rp 1,042,223,520
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp 12,948,000
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp 566,925,000
6.	BAGIAN HUKUM	KEPALA BAGIAN HUKUM	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp 872,495,000
					Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp 253,013,000
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp 503,980,000
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp 115,502,000
7.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp 83,190,000
					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp 99,975,000
				Pelaksanaan Administrasi	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp 61,583,500
					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp 74,331,000
					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp 110,525,000

				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp 86,997,000
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp 70,922,500
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp 65,881,500
8.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PROGRAM PEREKONOMIAAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1,878,399,500
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp 767,510,000
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 306,345,000
					Rp 60,500,748,084

J. WALIKOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS